

SKRIPSI

**UPAYA PENGEMBANGAN UKM
(STUDI WISATA KULINER DI KABUPATEN MAROS)**

Disusun dan diusulkan oleh

MUH. UMAR

Nomor Stambuk 10561 04064 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PENGAJUAN SKRIPSI

**UPAYA PENGEMBANGAN UKM
(STUDI WISATA KULINER DI KABUPATEN MAROS)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

MUH. UMAR

Nomor Stambuk 10561 04064 11

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi
Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros)
N a m a : Muh. Umar
Nomor Stambuk : 10561 04064 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Mengesahkan

Pembimbing I

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Unismuh Makassar,



Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan,
Ilmu Administrasi Negara.

Nasrulhaq, S.Sos, MPA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at Tanggal 31 Bulan Agustus Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)



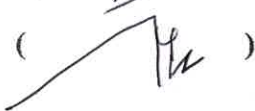
2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si



3. Abdul Kadir Adys, SH, MM



4. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Umar

Nomor Stambuk : 10561 04064 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasi orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang Menyatakan,



Muh. Umar

ABSTRAK

MUH. UMAR 2018. *Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros)*. (dibimbing oleh Lukman Hakim dan Ansyari Mone).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan menganalisis data serta informasi yang diperoleh dari informan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti pada instansi tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Fenomenologi yaitu mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner di Kabupaten Maros). Penguatan diperlukannya strategi penguatan dan pengarahan dari sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan dimana sosialisasi itu menjelaskan tentang tata cara bergabung di Koperasi dan dapat membentuk UKM. Dari pembinaan UKM akan berlaku seperti, untuk mendapatkan dana setiap pelaku usaha, agar pengembangan UKM bisa berjalan dengan optimal. Pemberdayaan dalam pemberdayaan destinasi wisata kuliner pihak pemerintah mendukung dan memaksimalkan suatu sarana dan prasarana, selain itu perlu adanya suatu pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan agar pemberdayaan UKM bisa lebih optimal. Perlindungan perlu adanya dukungan pemerintah melalui suatu perlindungan belum optimal agar dapat memberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pengembangan UKM tersebut.

Kata kunci : Upaya Pengembangan UKM

2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos, MPA**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan
5. Kedua orang tua **Mansur dan Nurmi** tercinta yang telah memberi sumbangsi materi dan moral
6. Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Kabupaten Maros dan segenap jajaran dan staf, dan Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner, terima kasih atas bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
7. Saudara yang tercinta **Muh. Adi, Muh. Aris dan Herlina** yang selalu memberi saya semangat dan dorongan untuk menjadi orang yang sukses dalam meraih gelar sarjana.
8. Sahabat saya **Andi Jaya Samudra, Fahlevi, Opi, Dan Muhammad Qadri MS** yang tak pernah bosan memberikan motivasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam penulisan Skripsi ini. Dan Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda d sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, Dan Semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin

Makassar, 2018

Muh. Umar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Strategi.....	9
B. Konsep Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).....	19
C. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25
D. Kerangka Pikir	27
E. Fokus Penelitian	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
1. Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	36
2. Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros	43
BAB V PENUTUP DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata merupakan minat khusus, terutama wisata budaya, wisata alam maupun wisata kuliner adalah potensi yang dimiliki negara Indonesia. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia, disekitar daerah tujuan wisata yang merupakan peran penting dalam pengembangan sektor kuliner. Wisata kuliner dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan serta devisa bagi perekonomian nasional sedangkan bagi peningkatan kesejahteraan yang dapat dilakukan dengan pengembangan sektor UKM pada setiap daerah di Indonesia.

Pengembangan UKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perekonomian nasional. Salah satu peluang UKM yang banyak diminati adalah usaha kuliner. Usaha kuliner merupakan bisnis yang tergolong tidak mudah dikarenakan membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas dalam pengembangannya sehingga dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi tersebut berperan penting dalam keberlanjutan dari UKM kuliner. Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya Undang Undang tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

mewujudkan daerah yang mandiri dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan peningkatan perekonomian daerah melalui perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pengaruh dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah pada terbentuknya daerah daerah otonom. Di mana dalam Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah otonom berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintahan di Indonesia bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Akibat lain dari pemberian hak otonom tersebut adalah adanya perubahan pada pendekatan pembangunan. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat sentralistis, tetapi lebih mengutamakan peran serta masyarakat desentralisasi, seiring dengan meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan UKM merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan UKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM cukup signifikan.

Upaya-upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Strategi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu penerapan strategi dapat menentukan hasil yang akan dicapai. Adapun strategi yang dimaksud disini adalah strategi manajemen dalam memberdayakan UMKM yang lebih berorientasi pada pengembangan strategi secara makro. Melihat kondisi kekinian tentunya peran seluruh stakeholder dalam implementasi dari strategi pemberdayaan tersebut sangat diharapkan.

UKM berbasis kuliner merupakan suatu sektor usaha yang paling mendominasi di Kabupaten Maros., strategi pengembangan UKM berbasis

kuliner serta persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil dan Menengah berbasis kuliner di Kabupaten Maros. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan dengan cara :

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, serta sebagai implementasi dari Undang - undang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun beberapa program yang berkaitan dalam proses pengembangan UMKM. Program - program tersebut tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Maros “Mewujudkan Pertumbuhan dan Pengembangan Wisata Kuliner di Kabupaten Maros”. Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyusun beberapa program sebagai usaha untuk mencapai Misi. Program - program kerja yang terkait dengan pengembangan UMKM antara lain :

- a. *Follow up* program pengembangan lembaga penjamin kredit mikro
- b. Pengembangan model jaringan badan badan usaha skala mikro tingkat kelurahan
- c. Pengembangan koperasi dan ekonomi skala menengah besar.

Program - program pengembangan tersebut selama ini sedikit banyak sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Tentu saja pengimplementasian program tersebut bertujuan untuk mengembangkan

sektor UMKM, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebab, sektor UMKM ini dapat membantu untuk memajukan perekonomian daerah terkhusus bagi wisata kulinernya. Lebih lanjut lagi mengenai bagaimana strategi pemberdayaan UMKM disektor perdagangan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Maros. Hal demikian didasari oleh asumsi bahwa sektor perdagangan selama ini semakin berkembang pesat dengan mencakup hampir seluruh pelosok daerah kabupaten Maros.

Upaya - upaya peningkatan akses terhadap pasar, modal, manajemen, teknologi, serta penguatan dan penataan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan pasar dan kemitraan antara ketiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, serta KUKM. Pengembangan sektor wisata kuliner, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros dirasa sangat penting untuk dilakukan. Sebab, dilihat dari kondisi yang ada saat ini, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu memberikan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maka dari itu, merupakan tugas utama bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Maros untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sebagai konsekuensinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan

berbagai program program kegiatan khususnya wisata kulinernya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik.

Adapun masalah dalam pengembangan UKM yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya manusia dan lahan tempat, masalah yang pertama yaitu permodalan, bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah Wisata kuliner di Kabupaten Maros hanya memiliki modal yang jumlahnya masih kecil sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya secara lebih maju, yang kedua masalahnya yaitu bahan baku. Melihat bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kuliner sulit untuk mendapatkan bahan baku dari produknya tersebut dikarenakan faktor musim yang tidak menentu yang mengakibatkan harga jual bahan baku di pasaran menjadi tidak stabil serta kualitas yang dijual di pasar tidak semuanya memiliki kriteria yang sesuai standarisasi, yang ketiga masalahnya yaitu sumber daya manusia..Berdasarkan permasalahannya dibutuhkan suatu perhatian yang lebih dari pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penjelasan tersebut yang peneliti harapkan adalah menggali dan menganalisis secara mendalam terkait strategi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah bidang kuliner di Kabupaten Maros.

Terkait dengan beberapa masalah tersebut di atas peneliti tertarik mengangkat judul penelitian : *Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dibidang Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*", yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan". Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ideide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen elemen di dalamnya untuk menyusun langkahlangkah atau tindakan tindakan dengan memperhitungkan faktor faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan menurut Afifuddin (2010:87).

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan

sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:167-168) secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan. Salah satu pendekatan yang ada adalah “Strategi sebagai kegiatan, sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan perusahaan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan”. Di dalam perkembangannya definisi strategi mengalami perluasan arti. Berikut ini beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli manajemen. Freddy Rangkuty (2011:4) memberikan definisi strategi ”Strategi merupakan respon - secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi”. Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Pasolong (2014:03) mendefinisikan “strategi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya menjelaskan pengertian strategi sebagai berikut : ”Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui

hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Adanya pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mengembangkan suatu usaha. Strategi pengembangan adalah strategi yang membantu pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya yang masih berskala kecil menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Strategi pengembangan tersebut harus disusun dan dirancang dengan baik dan dengan mempertimbangkan segala aspek lingkungan internal maupun eksternal usaha agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dirumuskannya strategi tersebut. Menurut Suryana (2013: 221), teknik pengembangan usaha terbagi dua, yaitu :

a. Perluasan skala ekonomi (*Economic of Scale*)

Cara ini dapat dilakukan dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Ini dilakukan bila perluasan usaha atau peningkatan output akan menurunkan biaya jangka panjang, yang berarti mencapai skala ekonomi (*economic of scale*). Sebaliknya, bila peningkatan output mengakibatkan peningkatan biaya jangka panjang (*diseconomies of scale*), maka tidak baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, bila produk barang dan jasa yang dihasilkan sudah mencapai titik paling efisien, memperluas ekonomi tidak bisa dilakukan, sebab akan mendorong kenaikan biaya.

b. Perluasan Cakupan Usaha (*Economic of Scope*).

Perluasan cakupan usaha adalah diversifikasi usaha ekonomis yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Cara ini bisa dilakukan dengan

cara menambah jenis usaha baru, produk, dan jasa baru yang berbeda dari yang sekarang diproduksi (diversifikasi) serta dengan teknologi berbeda. Dengan demikian, lingkup usaha ekonomis (*economics of scope*) dapat didefinisikan sebagai suatu diversifikasi usaha ekonomis yang memproduksi dua atau lebih jenis produk secara bersama dalam memproduksi dua atau lebih jenis produk secara bersama-sama adalah lebih kecil daripada penjumlahan biaya produksi masing-masing produk itu apabila diproduksi secara terpisah. Perluasan cakupan usaha ini bisa dilakukan apabila wirausahawan memiliki permodalan yang cukup. Untuk pengembangan usaha agar mampu bersaing, usaha tersebut harus memiliki hal-hal seperti, kompetensi khusus, kemampuan internal, kompetensi inti, kreativitas dan keinovasian, fokus strategi, dan teori dinamis menurut Suryana (2013:236)

Selanjutnya Solihin Ismail (2012:102) menjelaskan tentang tipe - tipe strategi yang diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu :

- 1) Strategi Organisasi. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru.
- 2) Strategi Program. Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi implikasi strategik dari suatu program baru.
- 3) Strategi Pendukung Sumber Daya. Strategi ini memusatkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

- 4) Strategi Kelembagaan. Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif inisiatif stratejik.

Pengertian lain mengenai manajemen strategik dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014:09), yaitu : “Manajemen Strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif, dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional untuk menghasilkan barang dan/ jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategik) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategistrategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu melihat secara obyektif kondisi kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Pengertian perencanaan strategis menurut Sukirno Sadono (2012:43) yaitu : “Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu

bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.” Suryana (2013:5). Maksud dari definisi tersebut adalah seorang pimpinan puncak perlu menetapkan langkah langkah atau strategi apa yang akan diambil untuk melakukan tindakan penting dalam organisasi dengan mengadakan analisis terhadap faktor faktor internal dan eksternalnya terlebih dahulu.

Menurut Suryana (2013:13), perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat, yaitu :

- a. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi strategi yang efektif.
- b. Memperjelas arah masa depan.
- c. Menciptakan prioritas
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
- e. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan.
- f. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang bidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
- g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
- h. Memecahkan masalah utama organisasi.
- i. Memperbaiki kinerja organisasi.
- j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Lebih lanjut Suryana (2013:55) menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan langkah yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis. Langkah langkah tersebut adalah :

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi mandate organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman.
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Tujuan dari proses awal perencanaan strategis adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun eksternal. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi suatu perencana strategi yang sukses. Langkah kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat yang diemban organisasi, baik formal maupun informal.

Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai nilai organisasi. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi

harus melakukan dan apa yang dilakukan. Langkah keempat, menilai lingkungan eksternal, dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Langkah kelima, menilai lingkungan internal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memonitor kondisi sumber daya yang dimiliki (*input*), strategi mana yang digunakan sekarang (*proses*), dan bagaimana kinerja pegawai (*output*).

Langkah keenam, mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi. Suatu pernyataan mengenai permasalahan strategis harus memuat tiga elemen yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, pentabulasian faktor faktor penyebab permasalahan strategis, dan penentuan konsekuensi kegagalan dalam mengatasi permasalahan strategis tersebut. Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu. Merancang strategi dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi. Sebuah strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut : secara teknis dapat dilaksanakan, secara politis dapat diterima, dan strategi tersebut harus terkait dengan permasalahan yang akan diatasi. Langkah kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis ini, organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Selanjutnya dengan mengadopsi konsep perencanaan strategis yang telah dikemukakan oleh Suryana (2013:22), penulis meringkas langkah langkah dalam perencanaan strategis yang meliputi :

1. Identifikasi Visi, Misi, dan Mandat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) identifikasi visi, misi, dan mandat diperlukan untuk mengetahui alasan kehadiran suatu organisasi dan tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan membentuk organisasi tersebut. Tujuan identifikasi mandat adalah untuk mengenali dan memperjelas tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Maros. Visi organisasi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi arah atau pegangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mewujudkan cita cita yang selaras dan berkesinambungan, sedangkan misi organisasi adalah tujuan yang unik yang dapat membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis dengan mengidentifikasikan cakupan operasinya. Jika mandat merupakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka misi adalah mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan.
2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
 - a. Faktor Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas, dan fungsi organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM, yang merupakan aspek aspek yang membantu maupun yang merintangai pencapaian misi dan pemenuhan mandat.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat luas dan kompleks serta selalu berubah ubah menurut yogi (2012:05). Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan, baik direncanakan maupun tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM tidak mengalami kemunduran, maka Dinas Koperasi dan UKM harus mampu melakukan adaptasi dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Lingkungan eksternal organisasi berpotensi menimbulkan peluang dan ancaman bagi Dinas Koperasi dan UKM. Analisis lingkungan eksternal dalam penelitian ini dilakukan melalui :

Hasil identifikasi terhadap lingkungan ini memberikan gambaran kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*treath*) atau sering disebut sebagai metode analisis SWOT yang diadopsi dari konsep manajemen strategis.

Menurut Sunarko (2014:29) memberikan penjelasan tentang SWOT sebagai berikut :

3. Kekuatan (*strength*) adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.
4. Kelemahan (*weakness*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan, dan kapabilitas yang secara serius dapat menghambat kinerja efektif perusahaan.
5. Peluang (*opportunity*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting adalah merupakan salah satu sumber peluang identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan peraturan, perubahan teknologi, membaiknya hubungan dengan konsumen dapat memberi peluang.
6. Ancaman (*threat*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, ancaman merupakan pengganggu utama dalam organisasi, adanya pesaing, perubahan teknologi, adanya peraturan baru atau yang direvisi yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan organisasi.

B. Konsep Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kata "pengembangan" yang dikemukakan oleh Prabu Mangkunegara Anwar (2014:65), sebagaimana tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai hal, cara, atau hasil mengembangkan; sedangkan mengembangkan sendiri berarti membuka, memajukan, menjadi maju, dan bertambah baik. Tambunan (2012:06) menjelaskan tentang krusialnya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena mempunyai peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Selain itu, dijelaskan dalam penelitiannya Situmorang (2013:23) menyatakan permasalahan yang sering dialami Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa: a) kurangnya modal, b) pemasarannya sulit, c) struktur organisasinya sederhana serta pembagian kerjanya tidak baku, d) kualitas manajemennya rendah, e) SDM terbatas dan kualitasnya rendah, g) kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, h) aspek legalitas lemah serta j) rendahnya kualitas teknologi. Oleh karena itu, Hafsah (2012:20) menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu: 1) penciptaan iklim usaha yang kondusif, 2) bantuan permodalan, 3) perlindungan usaha, 4) pengembangan kemitraan, 5) pelatihan, 6) membentuk lembaga khusus, 7) memantapkan asosiasi, 8) mengembangkan promosi dan 9) mengembangkan kerjasama yang setara. Menurut Suharto (2010:8), tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya.

Saat ini tuntutan agar pemerintah mampu secepatnya merealisasikan pencapaian kesejahteraan sosial, semakin besar. Sedarmayanti (2014:17-18). Penjelasan Suharto (2010:09) mengenai konsep welfare juga membantu mempertegas substansi pembangunan kesejahteraan sosial dengan menyatakan bahwa welfare (kesejahteraan) dapat diartikan sebagai “well-being” atau “kondisi sejahtera, pengembangan kesejahteraan sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang

miskin. Seperti di negara lain, maka pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada bidang, ya-itu pelayanan sosial (*social service/provisions*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat (*community/social empowerment*). Ketiga fokus kegiatan tersebut dilakukan dengan ber-dasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan.

Definisi lain mengenai pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : "Pengembangan merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki." (Adapun pendapat Susanto (2014:32) mengenai pengembangan yaitu bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. "Development (pengembangan) adalah kriteria efektivitas yang mengacu pada kemampuan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan lingkungan pada saat sekarang dan masa datang". Menurut Solihin Ismail (2012 :113-114) terdapat beberapa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah sebagai koordinator Pemerintah daerah merencanakan, menetapkan dan mengusulkan suatu kebijakan atau dalam hal ini berhubungan dengan pembangunan daerah yang menjadi otonominya. Disisi lain, peran koordinator dalam pembangunan ekonomi daerahnya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam

mengumpulkan informasi ekonomi seperti lapangan kerja yang terbuka, angkatan kerja yang ada serta pengangguran. Serta dapat pula bermitra dengan swasta maupun lembaga-lembaga yang lain menurut Ginanjar (2014:21).

Sedangkan menurut Susanto (2014:33), pengertian pengembangan adalah Pengembangan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap sikap atau menambah kecakapan. Hasil yang diharapkan dari pengembangan adalah agar pegawai memiliki pengetahuan atau informasi baru, kemudian mampu menerapkan pengetahuan baru tersebut guna meningkatkan kinerja dan kecakapan serta mengubah perilaku menjadi lebih baik sebagai salah satu usaha dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Umar Husain (2013:76).

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, Strategi yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan membentuk 3 strategi kebijakan, yakni :

7. Strategi penguatan, yakni strategi yang bertujuan untuk memperkuat jalannya usaha sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bertahan di tengah perkembangan jaman.
8. Strategi pemberdayaan, yakni strategi untuk melakukan usaha usaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang mendukung keeksistensian sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
9. Strategi perlindungan, yakni strategi yang dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar hambatan hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir.

Strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

- b. Bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Contohnya pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menggunakan Lembaga Keuangan, antara Lain : koperasi, perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga pembiayaan lainnya).
- c. Perlindungan Usaha, jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).
- d. Pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), atau antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun diluar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam aspek kewiraswastaan,

manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilan lainnya dalam pengembangannya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

C. Konsep Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan beberapa kriteria mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria - kriteria tersebut antara lain kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun terdapat banyak definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun secara umum UMKM dilihat dari ciri - cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama. Ayu (2011:23), yaitu sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
- b. Tanpa staf yang berlebihan.
- c. Pembagian kerja yang kendur.
- d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki asas : Kekeluargaan, Demokrasi ekonomi, Kebersamaan, Efisiensi berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan

lingkungan, Kemandirian, Keseimbangan kemajuan, dan Kesatuan ekonomi nasional. Menurut Widiyanti Ninik (2010:13) Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

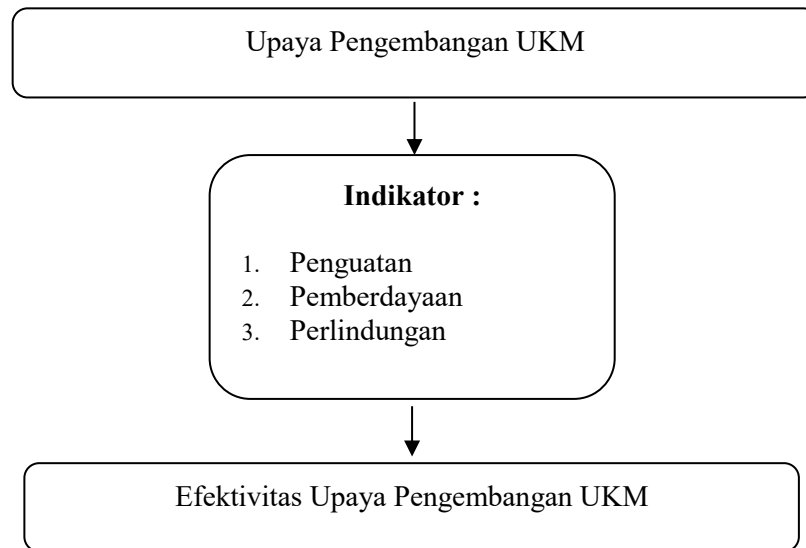
D. Kerangka Pikir

Pengembangan UKM Di Kabupaten Maros mempunyai potensi untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang. Hal ini berangkat dari fakta fakta empirik yang menunjukkan adanya tingkat perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi alternatif pemenuhan kesempatan kerja bagi sekian banyak suplai tenaga kerja yang ada. Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dijadikan sebagai katup pengaman terhadap kondisi ekonomi yang selalu berubah dan terdapat resistensi terhadap kondisi ekonomi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros), dalam strategi pengembangan meliputi : a.) Penguatan, b.) Pemberdayaan, dan c.) Perlindungan.

Berdasarkan hal ini, maka adapun kerangka fikir dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) yang meliputi : 1.) Penguatan, 2.) Pemberdayaan, dan 3.) Perlindungan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Penguatan, yakni strategi yang bertujuan untuk memperkuat jalannya usaha pada sektor wisata kuliner di Kabupaten Maros agar keberadaannya dapat selalu eksis dan bisa berkembang pesat;
2. Pemberdayaan, strategi untuk melakukan usaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang mendukung keeksistensian sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkhusus dalam wisata kuliner di Kabupaten Maros;
3. Perlindungan, strategi yang dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bidang wisata kuliner di

Kabupaten Maros, agar hambatan hambatan dalam perjalanan usaha dibidang kuliner bisa bertambah pesat;

4. Efektivitas Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) efektivitas dalam program pengembangan dalam kaitannya dengan wisata kuliner, tindakan memfasilitasi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga dapat dikatakan efektif apabila menyeluruh ke pelaku-pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dua bulan. Alasan peneliti memilih penelitian ini karena melihat bahwa pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Maros jumlahnya cukup banyak terhadap wisata kulinernya, selain itu potensi penghasilannya juga cukup besar sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Mengacu pada judul skripsi ini, maka lokasi penelitian ini di Dinas Koperasi Kabupaten Maros, Tentu saja hal ini tidak lepas dari campur tangan Dinas Koperasi dalam menangani pengembangan UKM tersebut, melalui strategi - strategi yang telah disusun.

2. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan menganalisis data serta informasi yang diperoleh dari informan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti pada instansi tersebut yaitu mengenai Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Fenomenologi yaitu mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak

ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari mengenai masalah Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros).

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung.

4. Informan Penelitian

Sesuai dengan tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi maka Pemilihan informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu, alasan dipilihnya beberapa informan dari Dinas Koperasi Kabupaten Maros sesuai dengan tugas tugas pokoknya beserta tokoh masyarakat yang didasari dengan pertimbangan yang akan didapatkan informasi yang akurat dan detail yang mudah di mengerti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah terlihat pada tabel di bawah ini :

- a. Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang

- b. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang
- d. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang
- e. Kasi Pengembangan Dan Permodalan UMKM Pada Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang
- f. Kasi Standarisasi, Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Pada Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros 1 Orang
- g. Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner 6 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan interview atau tanya jawab kepada informan mengenai masalah pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada penelitian ini wawancara akan menggunakan pedoman wawancara tanpa menentukan urutan pertanyaan, adapun alasan dipilihnya beberapa informan dari Dinas Koperasi Kabupaten Maros meliputi Kepala Dinas koperasi Kabupaten Maros, Sekretaris Dinas Koperasi Kabupaten Maros dan Staf Dinas Koperasi Kabupaten Maros sesuai dengan tugas tugas pokoknya beserta tokoh masyarakat yang didasari dengan pertimbangan yang akan didapatkan informasi yang akurat dan detail yang mudah di mengerti.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena obyek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Teknik ini dilakukan karena untuk mencari dan mendapatkan sesuatu diluar atau tidak mungkin diperoleh dari sumber data langsung, sehingga dapat diharapkan nilai data yang diterima melalui pengamatan langsung akan memberikan kekuatan pandangan tentang nilai atau validitas data tersebut, sebagai pembanding dari sumber data baku yang sudah ada. Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari nara sumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya. Dokumentasi diperlukan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian yang tidak mungkin diperoleh dengan observasi dan interview. Dokumentasi dilakukan dengan cara memilih dokumen-dokumen yang ada dan diambil data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Menurut Sugiyono (2012:334) Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-

temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

7. Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2012:370) ada tiga macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangannya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner di Kabupaten Maros), serta menjelaskan tentang upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner di Kabupaten Maros) Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Maros dan gambaran umum objek penelitian yaitu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Gambaran umum Kabupaten Maros mencakup kondisi fisik dan wilayah, dan visi misi Kabupaten Maros. Gambaran umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari visi dan misi organisasi; kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi tersebut.

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

A. Sejarah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah sebuah kerajaan yg cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas kerajaan Siang), bagian timur berbatsan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar). Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah

pemerintahan I mallombassi dg mattawang karaeng bonto mangngape' Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kekalahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yang dinamakan. Cappaya Ri Bungaya ” atau ” perjanjian bungaya “.yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan ” bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan “.Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian Barat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau 2.3% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas, yaitu :

1. Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Selatan adalah Kota Makassar
3. Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone
4. Sebelah Barat adalah Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau sekitar 3,54% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (45.764,53km²). Panjang pantai Kabupaten Maros adalah 31 Km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai berpasir putih yang membentang. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka daerah pemerintahan Kabupaten Maros terdiri 14 Kecamatan yang terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan. Dari 14 Kecamatan tersebut terdapat 89

lingkungan dan 320 dusun. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mallawa dengan luas wilayah 235,92 km² atau 14,57% dari luas wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Turikale (Ibukota Kabupaten) dengan luas 29,93 km² (1,85% dari luas wilayah kabupaten). Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih terdapat 22 Desa/Kelurahan swadaya dan 22 Desa/Kelurahan Swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 Desa telah termasuk kategori Desa Swasembada.

Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maros sendiri mengusung visi dan misi untuk menanggapi persoalan tersebut. Visinya Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional, sedangkan misinya meliputi :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan;
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Maros, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang Industri serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 23 Tahun 2014 kepada pemerintah.

Dari capaian kerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya adalah terselenggaranya program-program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program kerja tahunan yang ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.

Secara umum sasaran srtatejik yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros telah dicapai sebahagian target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan, beberapa kebijakan telah diambil dan mewujudkan keberhasilan, dan telah dilaksanakan semuanya serta mencapai kinerja yang diharapkan, namun belum 100% karena dipengaruhi oleh faktor lain dan dana pendukung.

Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Maka ditetapkan visi: “Mewujudkan Maros Sebagai Kabupaten Koperasi, Industri dan Perdagangan Yang Terkemukadi Sulawesi Selatan”. Visi merupakan untuk mewujudkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros lebih maju dan untuk mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai suatu kemajuan di segala bidang dan aspek kehidupan baik ekonomi, maupun aspek lainnya terutama peningkatan nilai produk dan peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi serta berkesinambungan.

Sedangkan misi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM, kelompok–kelompok usaha tradisional dalam bidang usaha, sehingga mampu mengelolah usahanya dengan baik.

- b. Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sukoguru perekonomian daerah yang melibatkan Industri, perdagangan dan UKM.
- c. Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui subsidi kebutuhan dasar. Bantuan kredit dan bantuan modal kerja.
- d. Meningkatkan aktivitas dan kuantitas industri dan perdagangan untuk pengembangan kemitraan usaha.
- e. Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor perizinan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah.
- f. Meningkatkan kemampuan keterampilan daya saing para industri rumah tangga.
- g. Peningkatan/pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk unggulan di setiap kecamatan yang di kelola oleh koperasi.
- h. Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.

Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros yang berdasarkan peraturan Bupati Maros tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab.

Pedoman susunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi

yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a. Kasubag Program
 - b. Kasubag Kepegawaian dan umum
 - c. Kasubag Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Kepala Bidang Koperasi
 - a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi
 - b. Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi
- 5) Kepala Bidang UMKM
 - a. Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menegah
 - b. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL
 - c. Kepala Seksi Bina Usaha UKM
- 6) Kepala Bidang Perdagangan
 - a. Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah
 - b. Kepala Seksi Sarana Peng. Sarana Perdagangan Pndf. Perusahaan
 - c. Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen
- 7) Kepala Bidang Perindustrian
 - a. Kepala Seksi Sarana Usaha Industri
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi

c. Kepala Seksi Pengawasan Industri

8) UPT. Pasar

a. KTU.UPT Pasar

9) UPT. Industri

a. KTU. UPT Industri

2. Upaya Pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros)

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros), peneliti menggunakan indikator-indikator yang meliputi : a.) Penguatan, b.) Pemberdayaan, c.) Perlindungan.

Hasil pengkajian terhadap ke tiga indikator tersebut adalah :

a. Penguatan

Tujuan dari dilaksanakannya suatu program pengembangan UKM adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal. Sasaran program ini adalah meningkatkan penataan kelembagaan, permodalan, dan pemasaan bagi UKM sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat.

Seperti di katakan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros pada hasil wawancara yang menyatakan :

“Wisata kuliner di Kabupaten Maros memiliki potensi luar biasa. Keanekaragaman dan keunikan kulinernya yang bersumber wisata kulinernya ialah kekayaan yang pertumbuhannya harus terus digenjot. untuk memaksimalkan kekayaan tersebut, perlu upaya penguatan dan perlindungan agar wisata kuliner berkembang lebih pesat, zaman, dan

perubahan pola gaya hidup masyarakat di Kabupaten Maros.”
(wawancara : FJ, tanggal 16/07/2018)

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa potensi wisata kuliner yang berada di Kabupaten Maros sangat memiliki potensi yang luar biasa oleh karena itu pertumbuhannya tersebut harus digenjot agar wisata kuliner bisa dikenal dan berkembang pada zaman yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan :

“Agar setiap calon pengusaha dapat membentuk UKM, maka diperlukan strategi penguatan dan pengarahan dari awal yaitu seperti Sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan. Dimana sosialisasi itu menjelaskan tentang tata cara bergabung di Koperasi dan dapat membentuk UKM serta menjelaskan mengenai bagaimana untuk mendapatkan dana, mendapatkan surat izin, mendapatkan logo halal dan sebagainya.” (wawancara : NB, tanggal 16/07/2018)

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa perlunya strategi penguatan sangat mempengaruhi dalam membentuk adanya usaha terutama pembentukan UKM, dari itu perlu adanya sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, agar lebih tahu tentang pembentukan UKM, dan lain sebagainya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan :

“Dengan adanya strategi penguatan pada sektor UKM, bisa berdampak positif dalam pengembangan suatu UKM khususnya wisata kuliner, kita bisa lihat dari data tersebut agar industri kuliner di UKM di Kabupaten Maros bisa dikenal luas.” (wawancara : EB, tanggal 16/07/2018)

Hasil wawancara di atas, dalam hal dapat dilihat bahwa adanya pemantauan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

perlu adanya pemantauan dan terlaksananya yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk membimbing mereka, oleh karena itu pemantauan memiliki peran penting bagi pelaku pada usaha maupun masyarakat tersebut agar dapat apabila ada suatu hal yang kurang di mengerti. Untuk itu pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros untuk memantau dan membimbing mereka sebagai pelaku UKM tersebut.

Hasil wawancara dari Kasi Pengembangan Dan Permodalan UMKM Pada Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“Dari pembinaan UKM akan berlaku seperti, untuk mendapatkan dana setiap pelaku usaha akan dibimbing sebagaimana agar mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Setiap kegiatan sosialisasi binaan dan pelatihan akan ada pantauan dari Dinas yang bertujuan untuk memantau setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Tetapi kenyataannya untuk dilapangan tidak berjalan sesuai semestinya dan tidak semua kelompok kerja dapat didata oleh dinas dikarenakan dengan alasan keterbatasan anggaran yang dialokasikan, itu sangat berdampak kurangnya upaya pengembangan UKM yang ada di Kabupaten Maros tersebut.” (wawancara : MS, tanggal 16/07/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dalam adanya pembinaan UKM agar dapat mendapatkan dana pada setiap usaha tersebut, dengan adanya sosialisasi tentang hal tersebut adanya pantauan dari instansi Dinas tersebut, akan tetapi terbatasnya anggaran yang berdampak pada kurangnya upaya pengembangan UKM tersebut.

Di lanjutkan hasil wawancara dari Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Strategi penguatan pada sektor UKM agar kiranya pemerintah Kabupaten Maros bisa memaksimalkan dalam wisata kuliner agar bisa berdampak lebih baik dalam mengembangkan usaha wisata kuliner agar biasa dikenal lebih banyak masyarakat, agar tertarik datang di Kabupaten Maros.” (wawancara : AA, tanggal 17/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam hal upaya pengembangan pada sektor UKM agar bisa memaksimalkan dalam usaha wisata kuliner tersebut agar dapat dikenal luas oleh masyarakat, agar tertarik untuk datang di Kabupaten Maros untuk berwisata kuliner.

Hasil wawancara dari Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Adanya strategi penguatan sangat penting pada setiap kegiatan pengembangan UKM memang harus ada pemantauan langsung dari Dinas, selama kegiatan yang berjalan pemantauan memang ada dilakukan oleh beberapa pihak yang diutuskan oleh dinas, namun pemantauan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.” (wawancara : MR, tanggal 17/07/2018)

Berdasarkan hasil semua wawancara di atas, strategi penguatan sangatlah penting untuk mengembangkan usaha UKM, untuk itu perlunya pantauan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, namun dilihat dari pantauan tidak optimal dan tidak berfungsi.

Hasil wawancara dari Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Saya rasa setuju dalam strategi penguatan pada sektor UKM dengan Kabupaten Maros adalah Kabupaten yang spesial karena memiliki wisata disetiap wilayah. Tak hanya wisata alam seperti wisata bantimurung yang menyuguhkan keindahan, wisata kulinerpun terus berkembang setiap tahunnya. Saya lihat data yang diperoleh pada tahun 2017 yang menyebutkan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Maros didominasi industri kuliner. Bahkan Kabupaten Maros merupakan

Kabupaten di Sulawesi yang menjadi destinasi wisata kuliner.”
(wawancara : LI, tanggal 17/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam hal strategi penguatan pada sektor UKM, kabupaten Maros memiliki wisata pada setiap wilayahnya, agar berkembang lebih pesat wisata kuliner perlu dikembangkan agar pengembangan UKM yang berada di Kabupaten Maros agar menjadi destinasi wisata kuliner yang dikenal dengan luas.

Hasil semua wawancara pada tersebut diatas, maka disimpulkan diperlukannya strategi penguatan dan pengarahan dari sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan. Dimana sosialisasi itu menjelaskan tentang tata cara bergabung di Koperasi dan dapat membentuk UKM. Dari pembinaan UKM akan berlaku seperti, untuk mendapatkan dana setiap pelaku usaha, agar pengembangan UKM bisa berjalan dengan optimal.

b. Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan yakni strategi untuk melakukan usaha usaha dalam rangka untuk memberdayakan segala sumber daya yang mendukung keeksistensian sektor UKM.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“UKM merupakan sektor usaha yang telah terbukti memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumberdaya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah. Secara khusus Kabupaten Maros cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan UKM sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan PAD.”
(wawancara : FJ, tanggal 16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada sector usaha dalam mengembangkan UKM di Kabupaten Maros mempunyai peran penting untuk memberikan perekonomian daerah, agar dapat memiliki peluang untuk mengembangkan dan memberdayakan suatu usaha terkhusus UKM, agar dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Maros tersebut.

Hasil wawancara dengan Kasi Pengembangan Dan Permodalan UMKM Pada Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“Melalui kegiatan pemberdayaan dalam pengembangan destinasi wisata kuliner di Kabupaten Maros ini, diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha, akademisi untuk segera menciptakan suatu wisata kuliner dan mempunyai kuliner khas yang dapat dikenal oleh masyarakat.”(wawancara : MS, tanggal 16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan adanya suatu kegiatan untuk pemberdayaan suatu UKM agar untuk mengembangkan dan membangun suatu destinasi wisata kuliner di Kabupaten Maros, agar dapat memotivasi para pelaku usaha maupun pada pemerintah bisa mengembangkan usaha terkhusus pada wisata kuliner agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan dalam pengembangan UKM dalam usaha wisata kuliner bahwa Kabupaten Maros memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kawasan wisata kuliner jika memiliki ikon kuliner khas meliputi roti maros. Untuk itulah sekarang saatnya kita bersiap-siap menjadikan Kabupaten Maros sebagai destinasi wisata kuliner. (wawancara : NB, tanggal 16/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan adanya suatu pelatihan, ada juga penyuluhan agar berguna untuk menambah suatu pengetahuan ataupun wawasan dari sumber daya manusia yang terkait pada pemberdayaan UKM, untuk itu penyuluhan dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang bertujuan meningkatkan daya saing pasaran, baik pada bentuk isian produknya, selain itu pula pemberdayaan juga bertujuan untuk melestarikan wisata kuliner yang akan datang tersebut.

Seperti yang di katakan oleh Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Untuk memantapkan sektor pada wisata kuliner, dalam upaya pengembangannya untuk memberdayakan wisata kuliner di Kabupaten Maros sebagai destinasi wisata kuliner unggulan. Pemilihannya didasarkan pada enam kelayakan, yakni produk dan daya tarik utama, pengemasan produk dan event, kelayakan, kelayakan lingkungan, kelayakan bisnis, dan peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata kuliner, diharapkan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi wisata kuliner tersebut.” (wawancara : NB, tanggal 16/07/2018)

Hasil wawancara di atas adanya pemberdayaan maupun pelatihan yang merupakan kebijakan pemerintah tersebut agar dapat memberdayakan suatu usaha UKM. Adanya suatu kebijakan dikeluarkan pada pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dapat dijadikan suatu pedoman untuk dapat mengembangkan UKM tersebut.

Seperti yang di katakan oleh Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya jenis-jenis pemberdayaannya adalah sistem UKM kita itu mengikuti pameran. Hanya kendala kita disini masalah produk kita itu kalah bersaing dengan produk yang disana ada produk yang khas kita yaitu krupuk, misalnya kalau masalah produk meubel dan hiasan-hiasan kita masih perlu belajar.” (wawancara : WL, tanggal 21/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan dalam upaya pengembangan UKM dalam wisata kuliner yang berada di Kabupaten Maros dengan mengikuti pameran, agar mempromosikan wisata kuliner tersebut, tetapi terkendala dengan masalah produk kalah bersaing dengan produk yang berada di Kabupaten Maros tersebut.

Di Lanjutkan hasil wawancara dari Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Guna mendukung Kabupaten Maros menjadi destinasi wisata kuliner, dalam pemberdayaan destinasi wisata kuliner akar kiranya pihak pemerintah mendukung dan memaksimalkan dalam hal ini sarana dan prasarana perlu adanya, agar dapat memberdayakan wisata kuliner dan agar bisa bersaing pada kabupaten maupun kota yang berada di Sulawesi Selatan.” (wawancara : WL, tanggal 21/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan UKM dalam wisata kuliner di Kabupaten Maros, agar kiranya adanya sarana dan prasarana yang mendukung para pelaku usaha UKM tersebut agar bisa bersaing.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan pada pengembangan wisata kuliner di Kabupaten Maros, dilakukan agar wisata kuliner dapat berkembang pesat baik di masa sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena pihak pemerintah agar memperhatikan pelaku usaha kuliner, agar bisa berdampak dan berkembang pesat bagi perkulineran di Kabupaten Maros tersebut.”(wawancara : NA, tanggal 21/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan pihak pemerintah harus memperhatikan pelaku usaha UKM, dengan adanya pemberdayaan dan pengembangan agar berkembang pesat untuk usaha UKM yang berada di Kabupaten Maros.

Hasil wawancara dengan Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya selaku pelaku usaha wisata kuliner untuk mengembangkan UKM di Kabupaten Maros, perlunya pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan terkait dengan pengembangan UKM Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan yang sangat penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mkiro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang. (wawancara : JI, tanggal 21/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dalam usaha pengembangan UKM wisata kuliner di Kabupaten Maros perlunya suatu strategi pemberdayaan yaitu adanya pelatihan, penyuluhan maupun kebijakan yang melibatkan segenap sumber daya manusia agar dapat memiliki pengetahuan dan suatu keterampilan untuk upaya pengembangan UKM di Kabupaten Maros.

Hasil semua wawancara tersebut, dapat disimpulkan upaya pengembangan UKM untuk memberdayakan wisata kuliner di Kabupaten Maros sebagai destinasi wisata kuliner unggulan, untuk itu dalam

pemberdayaan destinasi wisata kuliner pihak pemerintah mendukung dan memaksimalkan suatu sarana dan prasarana, selain itu perlu adanya suatu pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan agar pemberdayaan UKM bisa lebih optimal.

c. **Perlindungan**

Strategi perlindungan, yakni strategi yang dimaksudkan untuk melindungi jalannya usaha UKM, agar hambatan hambatan dalam perjalanan usahanya dapat diminimalisir. Adanya suatu program penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan tujuan terwujudnya perubahan perilaku gerakan UKM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan perubahan perilaku UKM dalam upaya mengembangkan wisata kuliner di Kabupaten Maros, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar pelaku usaha dengan pemerintah selaku pembina. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini antara lain adalah penyusunan kebijakan tentang UKM, maksud dari adanya penyusunan kebijakan yang mengatur tentang Koperasi dan UKM adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha Koperasi Dan UKM khususnya wisata kuliner di Kabupaten Maros.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros bahwa :

“Dalam penyusunan draft Raperda ini Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros bekerja sama dengan pihak ketiga. Tugasnya adalah mencari referensi-referensi tentang kebijakan Koperasi dan UKM di tingkat pusat. Untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah itu sendiri. Setelah disesuaikan kan

ada yang sesuai dan ada yang tidak. Dari itu, kita dapat menambah ataupun mengurangi.” (wawancara : FJ, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam proses penyusunan kebijakan dilakukan pada pihak Koperasi dan UKM dan mempunyai tugas mencari referensi-referensi tentang kebijakan Koperasi dan UKM di tingkat pusat. Untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah tersebut.

Hal ini yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yakni :

“Yang perlu diupayakan dalam pengembangan UKM, yaitu, pertama penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif. Kedua, bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. Ketiga, perlindungan Usaha, jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.”(wawancara : NB, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam hal ini pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM

Hasil wawancara dari Kasi Standarisasi, Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Pada Bidang Pemberdayan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu pemberdayaan

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif.” (wawancara : RY, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya

Selain itu Tokoh Masyarakat Yang Memiliki Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan, menurut saya perlu ditingkatkan dalam pengembangan UKM disini saya lihat masih kurang optimal terkhusus buat wisata kulinernya di Kabupaten Maros.” (wawancara : AA, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal ini adanya strategi perlindungan ini agar dapat melindungi baik pihak atau pelaku usaha khususnya wisata kuliner di Kabupaten Maros.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Masyarakat Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha UKM pada saat ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan tidak berkembang cepat dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan, maka dari itu, perlunya Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros untuk memfasilitasi atau

memberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pengembangan UKM itu sendiri.” (wawancara : RY, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal ini keterbatasan sarana dan prasarana yang meyebabkan tidak berkembang cepat dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan, maka dari itu, perlunya Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros untuk memfasilitasi agar pengembangan UKM khususnya wisata kuliner di Kabupaten Maros bisa berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara dari Kasi Standarisasi, Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Pada Bidang Pemberdayan Koperasi Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan fasilitasi ini bertujuan untuk mengembangkan UKM khususnya pada wisata kuliner, dalam kegiatan ini, kami memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana untuk usaha mereka, hal ini juga bermaksud agar wisata kuliner di Kabupaten Maros bisa meningkat pesat.” (wawancara : RY, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peran Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam memfasilitasi pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) mempunyai maksud untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan antara pelaku usaha dengan pihak yang dibutuhkan selaku pelaku usaha, atau dengan kata lain, Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan UKM tersebut.

Hasil wawancara dari Masyarakat Yang Memiliki Usaha Wisata Kuliner yang menyatakan bahwa :

“Kami senang sekali dengan adanya pemberian bantuan fasilitas dalam pengembangan UKM khususnya studi wisata kuliner di Kabupaten Maros. Adanya fasilitas yang memadai ini memberikan rasa nyaman bagi kami dalam memasarkan produk usahanya, selain itu, masyarakat juga merasa tertarik untuk datang berwisata kuliner karena adanya suasana yang menarik dan nyaman untuk dikunjungi. ” (wawancara : LI, tanggal 25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam usaha pengembangan UKM studi wisata kuliner di Kabupaten Maros, Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Maros juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Hingga saat ini, kegiatan fasilitasi wisata kuliner di Kabupaten Maros masih terus berjalan.

Hasil semua wawancara tersebut, dapat disimpulkan untuk memberdayakan usaha-usaha wisata kuliner di Kabupaten Maros perlu adanya dukungan pemerintah melalui suatu perlindungan belum optimal agar dapat memberikan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pengembangan UKM tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan diperlukannya strategi penguatan dan pengarahan dari sosialisasi, Pembinaan dan Pelatihan. Dimana sosialisasi itu menjelaskan tentang tata cara bergabung di Koperasi dan dapat membentuk UKM.
2. Pemberdayaan upaya pengembangan UKM untuk memberdayakan wisata kuliner di Kabupaten Maros sebagai destinasi wisata kuliner unggulan, untuk itu dalam pemberdayaan destinasi wisata kuliner pihak pemerintah mendukung dan memaksimalkan suatu sarana dan prasarana
3. Perlindungan untuk memberdayakan usaha-usaha wisata kuliner di Kabupaten Maros perlu adanya dukungan pemerintah melalui suatu perlindungan belum optimal agar dapat memberikan fasilitas dalam pengembangan UKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran untuk dapat lebih meningkatkan upaya pengembangan UKM (Studi Wisata Kuliner Di Kabupaten Maros) sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Gowa sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM di

Kabupaten Maros seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.

2. Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Gowa perlunya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.
3. Masyarakat sebagai pelaku UKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu. 2011, *Defenisi UMKM dan UKM*. Bandung: Erlangga.
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta
- David. 2011. *Strategi Adalah Sarana Bersama*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia . 2008. *Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Studi Industri Kreatif Indonesia, Departemen Perdagangan
- GINANJAR, 2014, *Strategi administrasi publik*. Bandung, Alfabeta.
- Hadari Nawawi. 2010. *Manajemen Strategis Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hafsah, 2012, *Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Bandung, Alfabeta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas.
- Mardikanto, Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung, Alfabeta
- Pasolong, 2014, *Teori Strategi administrasi publik*. Bandung, Alfabeta.
- Prabu Mangkunegara, Anwar. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Bandung: Erlangga
- Sunarko. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sukirno, Sadono. 2012. *Pengantar Bisnis : Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan : Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat

- Susanto, AB. 2014. *Manajemen Strategi Komprehensif*. Jakarta: Erlangga
- Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Situmorang, 2013, *Permasalahan UKM*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Tambunan. 2012. *Krusialnya Pengembangan UKM*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Widiyanti Ninik, 2010, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Yogi, dkk. 2012. *Manajemen Strategik Terapan: Panduan Cara Menganalisa Industri dan Pesaing*. Jakarta : Poliyama Widya Pustaka.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.